

## PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERPILIH

# Masih Menunggu Kepastian dari Pusat

**YOGYA (KR)** - Pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 resmi ditunda. Penundaan itu dilakukan menyusul arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mempertimbangkan perkembangan proses hukum sengketa Pilkada di MK.

Informasi berkaitan dengan hal itu diperoleh setelah Pemda DIY berkoordinasi dengan Mendagri tentang jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Dimana dalam pertemuan yang diadakan secara daring pada Senin (3/2) dilakukan beberapa koordinasi termasuk pengumuman resmi kepada provinsi dan kabupaten/kota soal penundaan pelantikan yang awalnya

dijadwalkan 6 Februari 2025. "Koordinasi dengan bupati dan walikota terpilih sudah kami lakukan. Termasuk mengenai aspek teknis seperti pakaian adat (ageman) yang akan dikenakan saat pelantikan. Adapun untuk SK pelantikan memang dari pusat, tapi yang bisa disiapkan dari daerah harus dipersiapkan dengan baik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny

Suharsono di ruang kerjanya, Senin (3/2). Beny mengungkapkan, Pemda DIY telah siap melaksanakan pelantikan. Karena semua persiapan telah lengkap, dan pihaknya hanya menunggu perkembangan dari daerah lain yang mungkin masih dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada. Rencananya pelantikan kepala daerah akan dilakukan secara terpusat di Jakarta sesuai dengan arahan pe-

merintah pusat. Kendati demikian semua persiapan yang sudah dilakukan tidak hanya dilaporkan ke pusat tapi juga sudah disampaikan kepada Gubernur DIY.

"Kalau menghitung waktu, pelantikan kepala daerah terpilih paling memungkinkan sekitar 20 Februari 2025, asalkan tidak ada perubahan lain dari skenario pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih lanjut Sekda DIY menambah, apabila MK mengumumkan hasil sengketa Pilkada pada 5 Februari, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pemerintah setempat bisa segera meny-



KR-Riyana Ekawati

**Beny Suharsono**

apkan proses pelantikan, asalkan hasil tersebut sudah diunggah dan bisa di-

akses oleh instansi terkait. Dengan demikian DPRD masing-masing da-

erah bisa segera melakukan rapat paripurna untuk kemudian kepala daerah diusulkan dilantik ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk posisi Penjabat (Pj) kepala daerah, Sekda DIY memastikan setelah dilakukan pelantikan kepala daerah definitif, para Pj akan langsung kembali ke jabatan semula tanpa perlu adanya Surat Keputusan (SK) tambahan.

"Setelah dilakukan pelantikan nantinya Pj otomatis kembali ke jabatan definitif. Jadi, begitu dilantik, Pj kembali ke pos masing-masing dan itu tidak perlu ada SK lagi," terangnya. **(Ria)-d**

## PERTAMA SEJAK TIGA TAHUN TERAKHIR

### Didorong Subsidi Tarif Listrik, Yogya Alami Deflasi

**YOGYA (KR)** - Kota Yogya mengalami deflasi pada Januari 2025 jika dibandingkan bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komoditas pendorong utama terjadinya deflasi tersebut ialah subsidi tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogya Mainil Asni, menjelaskan dalam tiga tahun terakhir setiap Januari atau bulan pertama di awal tahun, Kota Yogya selalu mengalami inflasi. "Saat ini untuk month to month angka inflasi di Kota Yogya ialah minus 0,35 persen. Artinya terjadi deflasi terhadap Desember 2024. Meski demikian untuk angka inflasi year on year atau dibandingkan Januari 2024 lalu tetap inflasi sebesar 1,30 persen," urainya dalam jumpa pers, Senin (3/2).

Meski kondisinya jauh berbeda dibandingkan tahun 2024 maupun 2023, namun aktivitas ekonomi di masyarakat justru tidak mengalami permasalahan. Apalagi kelompok makanan, minuman dan tembakau menyumbang inflasi cukup tinggi yakni 2,13 persen dengan andil 0,50

persen. Disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menyumbang inflasi hingga 0,92 persen dengan andil 0,06 persen.

Kendati demikian kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga menyumbang deflasi yang cukup dalam yakni minus 6,39 persen dengan andil deflasi 0,99 persen. Oleh karena itu secara total sepanjang Januari 2025 dibandingkan bulan sebelumnya tetap mengalami deflasi. "Dari komoditas perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, komoditas tertinggi penyumbang deflasi ialah listrik. Ini karena akibat dari kebijakan subsidi atau pemotongan tarif listrik hingga 50 persen untuk pelanggan 2.200 VA ke bawah," urainya.

Mainil Asni menyebut, subsidi tarif biasanya dikenakan pada pelanggan 900 VA atau 450 VA ke bawah. Akan tetapi sejak Januari hingga Februari tahun ini potongan tarif listrik diberlakukan secara lebih luas hingga pelanggan 2.200 VA. Selain tarif listrik, harga tiket

kereta api yang mengalami penurunan selama Januari lalu juga menyumbang deflasi di Kota Yogya. Hal ini wajar lantaran sepanjang Desember 2024 tiket kereta api berada pada batas atas seiring tingginya okupansi akibat libur panjang. Sehingga ketika memasuki Januari tarif listrik berangsur turun pada kisaran batas bawah.

Di sisi lain, Yogya yang merupakan daerah tujuan wisata juga mencatatkan rekor tersendiri. Terutama pada aspek tingkat penghunian kamar hotel yang menjadi tertinggi di Indonesia. Artinya kunjungan wisatawan di kota ini terbilang tinggi hingga mampu menggerakkan sektor perokonomian di wilayah. Terbukti, kelompok makanan, minuman dan tembakau tetap menjadi pendorong inflasi. "Termasuk di antaranya ialah harga cabai yang naik seiring cuaca ekstrem. Di pasar modern bahkan sempat sulit ditemukan. Tetapi rekan-rekan sedang melihat kondisi di lapangan," tandas Mainil Asni.

**(Dhi)-d**

## PENGECEK DILARANG MENJUAL GAS MELON

### Pemda DIY Belum Terima Surat Edaran Resmi

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY mengaku belum menerima surat edaran resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pelarangan penjualan gas melon kepada pengecer. Berkaitan dengan kepastian penerapan dari kebijakan tersebut Pemda DIY masih menunggu surat resmi dari pusat. Jadi sejauh ini penjualan gas melon di tingkat pangkalan masih mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

"Kami belum menerima surat resmi dari Kementerian ESDM. Saya sudah menanyakan kepada Bu Ana (Kepala DPUPESDM DIY) tapi juga belum menerima surat tersebut. Begitu pula dengan Kepala Biro Perencanaan juga belum menerima. Jadi soal pelarangan penjualan gas melon kepada pengecer. Kami masih menunggu arahan kebijakan dari kementerian pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Yuna Pancawati di Yogyakarta, Senin (3/2).

Yuna mengatakan, soal kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pusat, pihaknya menekankan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui kajian dan proses yang matang. Begitu juga untuk penjualan gas melon di pangkalan, sampai saat ini masih sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai HET. Adapun untuk pengecer, sampai saat ini

belum ada larangan terkait penjualan gas melon.

"Saya optimis kebijakan yang diterbitkan oleh pusat sudah melalui kajian yang mendalam. Namun, yang menjadi krusial adalah persiapan untuk penerapan kebijakan tersebut, yang harus dipersiapkan dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Kepala Disperindag DIY menambahkan, pihaknya selalu berupaya memastikan agar distribusi gas melon 3 kg tepat sasaran dan bisa diterima oleh mereka yang benar-benar berhak menerima. Sebagai bentuk keseriusan dari hal itu, Disperindag DIY terus melakukan pengawasan terhadap penjualan gas melon di pangkalan untuk memastikan bahwa harga jualnya sesuai dengan HET yang ditetapkan.

"Memang pengecer memang memiliki kesempatan untuk naik kelas menjadi pangkalan, namun ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan modal yang cukup. Tapi Pemda tidak bisa langsung memberikan bantuan modal kepada pengecer. Meski begitu para pengecer tidak perlu khawatir karena banyak lembaga jasa keuangan yang menyediakan pinjaman lunak, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bisa dimanfaatkan," paparnya, seraya menambahkan untuk bisa mengakses mereka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

**(Ria)-d**

## Oikumene Satukan Umat Kristiani



KR-Juvintarto

**Pastor dan pendeta bersama menutup ibadah Oikumene di GKJ Wirobrajan.**

**YOGYA (KR)** - Ibadat Oikumene dalam rangkaian Pekan Doa Sedunia berlangsung semarak, Minggu (2/2) malam di GKJ Wirobrajan Yogya. Diikuti umat dari Gereja Katolik HKTY Paroki Pugeran bersama GKJ Wirobrajan, GKJ Suryodingratan, GKJ Madukismo dan GBI Ngadinengaran.

"Mari merayakan iman kita bersama," ungkap Rm Ant Invarien Andriyanto Pr dalam homilinya mengambil bacaan Injil Yohanes 20 : 24-29 sesuai tema ibadah

Dijelaskan, umat Katolik dan Kristen dari berbagai denominasi gereja sebagai satu saudara menyembah Tuhan yang sama meski tata cara ibadatnya berbeda. "Mengikuti Yesus Kristus yang menyatukan kita, i ungkapnya. Turut bergantian memimpin ibadah Rm FX Sukendar Wignyasumarta Pr, Rm Stefanus Arif Gunawan Pr (HKTY Pugeran), Pdt Saryanto, SPk (dr GKJ Madukismo), Pdt Nanda Natalia Nugrahani SSI Teol, Pdt Yosef Krisetyo Nugroho SSos MDiv (GKJ Wirobrajan), Pdt Tri Nur Adi STH (GKJ Suryodingratan), Pdt Marthinus Sumendi MTh (GBI Ngadinengaran).

Secara bergantian umat dari masing-masing gereja juga membawakan lagu-lagu pujian. "Sebelumnya gowes Tour de Gereja diikuti sekitar 250 umat dari 5 gereja diselenggarakan Senin (27/1) lalu," jelas Edi S Miko dari Timpel Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) Paroki Pugeran. **(Vin)-d**

## ANGKAT TEMA 'SENI BUDAYA BENTUK KARAKTER BANGSA' Pekan Budaya Tionghoa Kembali Digelar di Ketandan

**YOGYA (KR)** - Setelah pada tahun 2024 lalu digelar di Bintaran Wetan Gunungketur, perhelatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) XX tahun ini akan dikembalikan di Ketandan. Sepanjang 6-12 Februari 2025, ribuan pengunjung dipastikan akan memadati kawasan tersebut.

Ketua Umum Jogja Chinese Art and Culture Centre (JCACC) Tandean Harry Setio, menuturkan pada tahun 2024 lalu bertepatan dengan hajjat Pemilu 2024 sehingga gelaran PBTY digelar secara sederhana. "Tahun lalu kami sengaja tidak mengundang banyak orang agar tidak menimbulkan kerumunan massa untuk menjaga Pemilu 2024. Tahun ini kami tarik lagi di kawasan Ketandan," tandasnya, Senin (3/2).

Diakuinya, Ketandan sudah menjadi magnet tersendiri seiring predikatnya sebagai kawasan pecinan di Kota Yogya. Selain menyimpan sejarah panjang Tionghoa di Yogyakarta, hingga saat ini juga banyak gedung berarsitektur China yang masih terjaga dengan baik.

Harry menambahkan, tahun ini pihaknya mengangkat tema Seni Budaya Membentuk Karakter Bangsa lantaran disesuaikan dengan kondisi faktual masa kini. Di mana pembentukan karakter bangsa tidak bisa dilakukan dengan mudah seiring kemajemukan masyarakat. Namun di sisi lain melalui seni budaya semua pihak bisa merasakan persatuan

dan terbangun sebuah kerukunan. "Harapan kami seni budaya bisa menjadi pemersatu bangsa dan memperkuat karakter bahwa Indonesia berdiri karena keragaman budaya yang mempersatukan satu sama lain," urainya.

Tidak hanya aspek budaya, keberadaan Teras Malioboro Ketandan juga menambah khasanah baru di kawasan tersebut. Maka tidak heran jika gelaran PBTY juga dikolaborasi untuk mempromosikan keberadaan Teras Malioboro agar mampu menjadi daya tarik baru bagi pengunjung.

Ketua Pelaksana PBTY XX Subekti Saputri Wijaya, memaparkan panggung di Teras Malioboro Ketandan menjadi salah satu venue gelaran peringatan Imlek tersebut. Terutama dengan gelaran beragam perlombaan setiap hari selama gelaran PBTY yang mengikutsertakan anak-anak sebagai peserta. "Tentunya orangtua akan ikut hadir di sana dan harapan kami mereka pun bisa berkeliling dan berbelanja di Teras Malioboro Ketandan sembari menunggu anaknya tampil," katanya.

Selain panggung di Teras Malioboro Ketandan, sejumlah lokasi juga akan dibangun tempat pertunjukan seni budaya. Antara lain Rumah Budaya Jalan Ketandan Nomor 9 serta eks taman parkir Ketandan. Tidak ketinggalan sepanjang Jalan Ketandan juga dipenuhi stand kuliner yang kerap dinantikan oleh pengunjung. **(Dhi)-f**

## PPSDM Geominerba Gelar Pelatihan Dukong Geopark Yogyakarta Menasional

**YOGYA (KR)** - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Geominerba, Kementerian ESDM didukung mitra kerja Anggota Komisi XII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Geowisata DIY di Hotel Forris, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, 3-8 Februari 2025. Pelatihan dan sertifikasi kali ini diikuti oleh 30 peserta pemandu geowisata di DIY.

Kepala PPSDM Geominerba Dwi Anggoro Ismurnianto menuturkan Indonesia memiliki keragaman geologi yang sangat kaya, termasuk di Yogyakarta. Potensi geowisata ini mendorong berkembangnya geopark di Indonesia yang beberapa sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Saat ini Indonesia memiliki tujuh geopark nasional dan sepuluh UNESCO Global Geopark.

"Untuk geopark Yogyakarta sekarang sedang dalam proses menuju geopark nasional," katanya di acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata, Senin (3/2).

Turut hadir memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara yaitu Asisten Bidang Perokonomian dan Pembangunan sekaligus Plh Ke-



KR-Devid Permana

**Gandung Pardiman memberikan arahan.**

pala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan DIY Drs Tri Saktiyana MSi. Serta Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto yang diwakili oleh staf ahli.

Menurut Anggoro, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, khususnya dalam memberikan kependudukan geowisata, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kualifikasi tertentu.

"Jadi peserta pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata ini nantinya akan menjadi pemandu geowisata yang profesional," ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM memberikan apresiasi tinggi diselenggarakannya kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi para pemandu geowisata di DIY. Gandung

berpesan kepada seluruh peserta untuk sungguh-sungguh mengikuti semua rangkaian kegiatan hingga dinyatakan kompeten dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat kompetensi. "Pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata ini sangat penting untuk mendukung pengembangan geopark yang ada di DIY," katanya.

Dalam pelatihan ini para peserta pemandu geowisata diberikan materi terkait kependudukan geowisata, praktik kerja lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan para pemandu geowisata di DIY mampu merencanakan geowisata dan mampu memberikan kependudukan terkait kegiatan geowisata. **(Dev)-d**